

# SEJARAH JARINGAN HIDAYATULLAH DI MINAHASA: PESANTREN DAN POLITIK DAKWAH

## *A HISTORY OF HIDAYATULLAH NETWORKS IN MINAHASA: PESANTREN AND DA'WAH POLITICS*

**Almunawar Bin Rusli**

*Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia*  
almunawar.binrusli@iain-manado.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31291/jlk.v18i2.749>

Received: Juli 2020; Accepted: Desember 2020; Published: Desember 2020

### **ABSTRACT**

*This article will look at the polemics of identity between Muslim and Christian in Minahasa from educational culture perspective has received less serious attention. This article employs a qualitative descriptive method with sociological approach. Participatory observations, in-depth interviews and literature studies were conducted in Tomohon at 2018. This study shows that Hidayatullah pesantren teach the doctrine of tawhid, sharia and muamalah in the passion way. While da'wa politics are their strategy to spread the truth of Islam to Christian society with mubaligh diaspora, marriage of mubarakah and distribution of the Hidayatullah magazine. The presence of Hidayatullah in Minahasa supporting the spirit of santrinizaton. They want to facilitate santri to practice the Islamic values to the fullest as well as establishing the believe that Islam sits on the most honorable place in Indonesia. The santrinizaton created the loyalty and obedience to the leaders in order to defend Islam from the attacks of the infidels' group.*

*Keywords: Hidayatullah Networks, Minahasa, pesantren, da'wah politics.*

### **ABSTRAK**

Artikel ini ingin melihat polemik identitas antara Muslim dan Kristen di Minahasa dari perspektif budaya pendidikan yang kurang mendapat perhatian serius. Studi ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan

pendekatan sosiologis. Observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi literatur dilakukan di Tomohon pada tahun 2018. Studi ini menunjukkan bahwa pesantren mengajarkan doktrin tauhid, syariah dan muamalah dengan cara yang penuh gairah. Sedangkan politik dakwah menjadi strategi mereka dalam menyebarkan kebenaran Islam kepada masyarakat Kristen melalui diaspora mubaligh, pernikahan mubarakah dan distribusi majalah Hidayatullah. Kehadiran Hidayatullah di Minahasa mendukung semangat santrinisasi. Mereka ingin memfasilitasi santri dalam rangka menunaikan ajaran Islam secara kaffah seraya meneguhkan keyakinan bahwa Islam tetap menduduki tempat terhormat di Indonesia. Santrinisasi melahirkan kesetiaan dan kepatuhan kepada pemimpin dalam membela Islam dari serangan kaum kafir.

Kata kunci: Jaringan Hidayatullah, Minahasa, pesantren, politik dakwah.

## PENDAHULUAN

Perjumpaan Islam dan Kristen selalu berkontestasi dalam identitas dan ideologi. Di satu sisi, Islam bergerak aktif sedangkan umat Kristen bereaksi terhadap perkembangan tersebut. Di sisi lain, Kristen bergerak aktif dan umat Islam meresponnya. Secara umum, keadaan seperti ini berlangsung sejak abad pertengahan dan modern. Di Indonesia, dunia Islam memiliki tingkat keyakinan dan motivasi religius yang lebih kuat. Hal ini dapat terlihat dari kemunculan salah satu organisasi Islam yakni Hidayatullah. Jaringan Hidayatullah telah menjadi perhatian utama dikalangan masyarakat Kristen Minahasa, Sulawesi Utara. Mayoritas penduduk Minahasa adalah Kristen Protestan dengan populasi sekitar 795.284 jiwa. Minahasa sendiri berhasil mengalami proses Kristenisasi radikal sejak hadirnya misionaris Jerman yaitu J.G. Schwarz dan J.F. Riedel (1831 hingga awal 1860-an). Pekerjaan mereka membawa banyak berkah. Ribuan orang Minahasa meminta dibaptis.<sup>1</sup> Relasi Islam-Kristen di Minahasa mulai mengalami pertarungan identitas dan ideologi sejak masa kepemimpinan Soeharto.

---

<sup>1</sup>De Jonge and Christiaan, "How Christianity Obtained A Central Position in Minahasa Culture and Society in Jan Sihar Arintonang And," in *A History of Christianity in Indonesia*, ed. Karel Steenbrink (Leiden- Boston: Brill, 2010), 419.

Pada Era Orde Baru, hubungan Islam dan Kristen melalui beberapa dinamika. *Pertama*, tahun 1966-1973 kedua pihak bersaing untuk mengembangkan diri dengan peran yang mantap dalam masyarakat melalui jalur politik. Fase ini memiliki banyak benturan sentimen karena identitas. Meskipun demikian, rezim ini lebih mengutamakan kepentingan Kristen daripada mengakomodasi Islam. *Kedua*, tahun 1974-1989, Islam semakin kokoh, walaupun posisinya dalam pemerintahan tidak begitu dominan, sementara kelompok-kelompok Kristen mulai bergeser karena kehilangan dukungan dari pemerintah karena pertimbangan gerakan populisme radikal Muslim. *Ketiga*, tahun 1990-1998 sekelompok Islam modernis semakin kuat sementara kelompok-kelompok Kristen terus mengalami kekerasan karena faktor historis yang menempatkan agama mereka sebagai peninggalan kolonial dan berarti jahat.<sup>2</sup>

Dinamika di atas pada akhirnya ikut mempengaruhi persepsi masyarakat muslim atas kehidupan masyarakat Kristen dan sebaliknya di Minahasa. Sehingga, mendorong terjadinya perkembangan dakwah Hidayatullah. Balikpapan dan Surabaya adalah dua kota di Indonesia yang menjadi basis utama jaringan Hidayatullah. Di sana berbagai macam konsep dan strategi Islamisasi diciptakan, diatur lalu disebarluaskan ke daerah-daerah minoritas Muslim dari masa Orde Baru hingga Reformasi. Terpilihnya Minahasa sebagai salah satu cabang dakwah mereka tentu saja menandakan bahwa revivalisme Islam belum punah. Revivalisme muncul dalam rangka merespons sekularisme. Anjuran agar kembali kepada ajaran pokok agama yang murni wajib dilaksanakan tanpa proses negosiasi maupun resistensi. Kaum revivalis mendukung jika keimanan harus bersumber dari keaslian wahyu Tuhan.

Secara teoritis, mereka membuat struktur koalisi yang menghubungkan ‘individu-individu teladan’ dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mewakili massa yang luas. Dengan melakukan itu, mereka membawa Islam untuk bersaing melawan ideologi lainnya yang dianggap sesat. Mereka berbagi imajinasi

---

<sup>2</sup>Jan S Arintonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 363–64.

untuk memandang syariat Islam dapat diterapkan sebagai sistem politik, sosial, ekonomi termasuk budaya.<sup>3</sup>

Polarisasi antara warga Hidayatullah dengan warga Kristen di Tomohon, Minahasa melahirkan relasi yang terbelah. Tahun 2009, pesantren mereka diberitakan media masa lokal sebagai salah satu lembaga yang mendukung mobilisasi teroris di Indonesia. Mereka langsung menggugat dan pemberitaan tersebut ditarik ulang.<sup>4</sup> Efek utama dari peristiwa ini adalah berkurangnya jumlah santri dan santriwati. Namun, belakangan mereka masih tetap eksis menjalankan rutinitas dan menunjukkan konsistensi bahwa Islam mampu tampil sebagai wacana utama untuk memperkuat identitas komunal Hidayatullah. Studi ini akan menjelaskan sejarah jaringan Hidayatullah di Minahasa. Bagaimana ideologi pesantren Hidayatullah dan bagaimana politik dakwah mereka dalam merekrut orang, memenangkan dukungan, sekaligus meningkatkan kredibilitas gerakan.

Kajian dari Martin van Bruinessen<sup>5</sup> menjelaskan bahwa pesantren Hidayatullah mengajarkan Islam puritan dengan penekanan kuat pada Al-Qur'an dan hadis. Pesantren ini terkenal luas melalui sebuah majalah yang telah diterbitkan sejak 1988 yaitu Suara Hidayatullah yang pada puncaknya mencapai 52.000. Majalah tersebut memberikan informasi bahwa semua jihad yang diperjuangkan di dunia diakibatkan adanya ideologi anti-Yahudi dan anti-Kristen. Mereka juga memiliki relasi pengetahuan dengan kelompok Islam radikal.

Kajian dari Saipul Hamdi,<sup>6</sup> menjelaskan bahwa pesantren Hidayatullah mempromosikan sentimen anti-AS dan pandangan

---

<sup>3</sup>Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi Dan Teori* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 56.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ustad Samsul Arifin, Koordinator Dakwah Hidayatullah di Manado, 13 Agustus 2018.

<sup>5</sup>Martin Van Bruinessen, "Tradisionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia," in *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*, ed. Farish A.Noor et.al (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008), 217.

<sup>6</sup>Saipul Hamdi, Paul J Carnegie, and Bianca J Smith, "The Recovery of a Non-Violent Identity for an Islamist Pesantren in an Age of Terror," *Australian Journal of International Affairs* 69, no. 6 (2015): 692–710.

militan kepada para siswanya. Peran pesantren dan pemimpin agama yang semakin aktif dalam politik sejak awal otonomi daerah membantu menjelaskan kehadiran Hidayatullah di arena politik. Setelah kejatuhan mantan presiden Soeharto pada tahun 1998, banyak pemimpin pesantren memasuki dunia politik, memanfaatkan jaringan keagamaan mereka yang luas untuk mendapatkan dukungan. Pesantren adalah sumber daya politik yang hebat dalam hal memobilisasi seluruh komunitas untuk mendukung partai-partai politik. Hidayatullah secara institusional bersifat politis, dengan fokus pada kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi. Namun, Hidayatullah juga telah membentuk hubungan dengan politisi dan partai politik sebagai cara untuk menghasilkan dana serta membuka kantor untuk dakwah dan konsultasi keagamaan.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka kajian ini memiliki konteks dan fokus yang berbeda. Konteks Minahasa sebagai benteng Protestan termasuk sebagian populasi beragama Katolik membuat jaringan Hidayatullah di sana akan dipetakan dengan baik. Wacana mayoritas dan minoritas menjadi dasar analisis utama. Wacana ini membantu dalam memberikan penjelasan tentang gejala Islamisme yang berkembang di Minahasa pasca Orde Baru. Islamisme menerima pandangan klasik bahwa Islam sebagai sistem yang lengkap dan universal. Oleh sebab itu, tidak perlu melakukan penyesuaian diri. Masyarakat harus diubah agar syariat dapat ditegakkan.<sup>7</sup> Selanjutnya, fokus terhadap sejarah pesantren dan politik dakwah Hidayatullah adalah satu bagian tidak terpisah karena dua elemen ini ikut memperkuat jaringan mereka di Minahasa.

Jaringan agama tercipta karena adanya identitas kolektif yang kemudian melahirkan solidaritas refleksif di kalangan orang-orang yang berpikiran sama melalui jaringan-jaringan ideologis, pendidikan, budaya, politik atau sosial. Identitas kolektif merujuk pada suatu jaringan hubungan aktif di antara para aktor yang berkomunikasi, berinteraksi, saling memenga-

---

<sup>7</sup>Noorhaidi Hasan, "Islam Di Kota-Kota Menengah Indonesia," in *Search of Middle Indonesia*, ed. Gerry Klinken and Ward Berenschot (KITLV-Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016), 225.

ruhi, bernegosiasi dan membuat keputusan. Bentuk organisasi, model kepemimpinan, saluran komunikasi, dan teknologi komunikasi merupakan elemen-elemen pembentuk jaringan hubungan ini. Jaringan mempermudah akses terhadap pengetahuan dan sumber daya. Jaringan sosial informal ikut menyebarkan tindakan kolektif dan memungkinkan koalisi.

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Sedangkan politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan diantara anggota-anggotanya. Politik menghendaki ada reformasi demokrasi. Reformasi demokrasi adalah kewarganegaraan yang aktif: sebuah kehadiran yang berkelanjutan dari individu, kelompok, gerakan-gerakan dalam setiap ruang sosial yang ada, baik institusional maupun informal, kolektif maupun individual, dimana mereka menegaskan hak-hak mereka dan memenuhi tanggungjawab mereka. Melalui proses ini, ide-ide, praktik-praktik dan politik alternatif dihasilkan.

Teori *contestation* Antje Wiener digunakan untuk menganalisis jaringan ini dan mengamati bagaimana justifikasi dan penegasian identitas keagamaan warga Hidayatullah dalam pesantren. Teori ini didasarkan pada tiga model kontestasi yaitu kontestasi pada level teks (*formal validity*), sosialisasi pengajaran (*social recognition*) dan ritual (*cultural validity*). Selain itu, teori *apparatuses ideology* Louis Althusser digunakan untuk mengamati bagaimana politik dakwah digerakkan untuk kepentingan ideologi warga Hidayatullah. Teori ini didasarkan pada tiga tesis utama yaitu (a) Ideologi merepresentasikan hubungan imajiner individu dengan kondisi keberadaan riil mereka (b) Ideologi memiliki keberadaan material. Ideologi muncul dari gagasan yang memiliki tindakan material yang subjektif (c) Ideologi menginterpelasi individu sebagai subjek. Tidak ada ideologi kecuali oleh subjek dan bagi subjek untuk menghasilkan fungsi sosial yang sama.

Studi ini merupakan *field research* yang dilakukan secara ekstensif pada warga Hidayatullah di Minahasa. Dengan demi-

kian, maka riset kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dipandang relevan dengan proses penelitian ini. Kualitatif-deskriptif digunakan karena eksistensi kewargaan menitikberatkan pada fenomena sosial yang melibatkan interpretasi, pengalaman, perasaan dan persepsi dari subjek yang dikaji. Sedangkan pendekatan sosiologis berkontribusi praktis kepada peneliti agar mampu melihat bagaimana hubungan interaksi individu dengan konstruksi sosial. Data dalam riset ini dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kritis. Wawancara mendalam dilakukan secara informal dan tidak terstruktur. Teknik-teknik wawancara ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kesempatan bagi peneliti untuk lebih dekat dengan para informan, yaitu para guru pendidikan Islam, para santri, dan masyarakat Kristen Tomohon, Minahasa.

Peneliti memposisikan diri sebagai pengamat aktif dalam aktivitas warga Hidayatullah di sekolah dan masjid. Sedangkan dokumentasi kritis ditempuh lewat analisis kearsipan pesantren dan gerakan politik dakwah Hidayatullah. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi kritis dapat memberikan perspektif dan alternatif dalam memahami jaringan mereka di Minahasa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Minahasa Dalam Literatur**

Minahasa adalah sebuah daerah di Sulawesi Utara. Istilah Minahasa, pertama kali muncul di catatan Belanda pada tahun 1789 dan hanya mengacu pada dewan kepala desa (*landraad*). Baru sekitar tahun 1820 istilah tersebut mengandung arti geografis atau etnis saat digunakan dalam masa kolonial, *landstreek van Manado*. Asal etimologis kata Minahasa umumnya merujuk pada sumber linguistik yaitu *mina-esa*, *maesa*, *maha-esa*. Semua mengacu pada penyatuan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah secara kultural dan linguistik, pada proses

menjadi satu.<sup>8</sup> Dampak eksternal yang paling kuat dalam proses pembentukan identitas Minahasa datang dari Gereja Protestan seiring dengan usaha mereka untuk menyebarluaskan agama Kristen. Saat ini, mayoritas penduduk Minahasa beragama Kristen dan di antara berbagai kongregasi yang ada, GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) adalah yang terbesar. Konstruksi identitas, baik di tingkat individu maupun kolektif, adalah proses dialektik antara mengenali kesamaan dan perbedaan, dan sebagai akibatnya, antara inklusi dan eksklusi.<sup>9</sup> Agama telah memainkan peran yang besar dalam proses ini karena Minahasa menjadi benteng Kristen di negara yang didominasi Muslim.<sup>10</sup>

Schouten menjelaskan, agama Kristen sangat berkontribusi pada diferensiasi sosial di antara orang Minahasa. Bentuk-bentuk kepemimpinan tradisional dan hubungan sosial berubah secara signifikan saat agama Kristen menyebar ke seluruh tanah Minahasa. Richard Siwu berpendapat bahwa kekristenan di Minahasa lebih merupakan agama yang personalistik. Akibatnya, ada pemisahan antara dunia sakral dan dunia profan. Agama Kristen juga telah mengadopsi dan mengakomodasi unsur budaya tradisional. Dengan kata lain, dalam menjalankan unsur sejarahnya, agama Kristen juga mengalami inkulturasi. Perubahan ini terlihat pada upacara dan perayaan di masyarakat Minahasa kontemporer. Transformasi agama Kristen muncul sebagai agama publik atau budaya baru bagi orang Minahasa.<sup>11</sup>

### **Sejarah Jaringan Hidayatullah di Minahasa**

Pesantren adalah lembaga studi Islam yang ditemukan di Indonesia dari zaman pra-kolonial hingga sekarang. Dulu, urusan

---

<sup>8</sup>Gabriele Weichart, "Identitas Minahasa," *Jurnal Antropologi Indonesia* 74 (2004): 61.

<sup>9</sup>Gabriele Weichart, "Identitas Minahasa: 62.

<sup>10</sup>Almunawar Bin Rusli, "Syekh Mohammad Arsyad Thawil (1851-1934) Perjumpaan Ulama Banten Dengan Jemaat Kristen Minahasa," *Jurnal Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 131.

<sup>11</sup>Basri Amin, "Moment of Citizenship: Association and Aspiration of Minahasan, North Sulawesi," *International Journal of Indonesian Society and Culture* 9, no. 2 (2017): 173.



utama mereka adalah menyediakan pembelajaran Islam bagi para santri Muslim yang memiliki cita-cita untuk kemudian menjadi penyebar agama Islam di komunitas asalnya. Dalam bentuknya saat ini dan di bawah naungan pemerintah Indonesia sekarang dan masa lalu, pesantren telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang melayani masyarakat luas. Kajian para sarjana menemukan tiga kekuatan pesantren. Pertama, pesantren berperan penting dalam budaya pendidikan dan pembentukan generasi penerus Muslim. Kedua, pesantren sangat terlibat aktif dalam politik elektoral. Ketiga, pesantren menjadi rujukan pokok dalam memberikan legitimasi dan legalitas atas otoritas keagamaan kaum Muslimin.<sup>12</sup> Sebagai pesantren yang tumbuh pada era Orde Baru, Hidayatullah juga memiliki tiga kekuatan di atas sejak awal ia berdiri.

Hidayatullah berdiri pada 7 Januari 1973 melalui pesantren kecil di Kalimantan Timur. Lima pendiri pesantren termasuk individu yang berasal dari latar belakang Islam tradisional dan modernis. Namun, sejak awal Hidayatullah lebih condong ke sikap modernis. Sikap ini terlihat pada pemahaman mereka terhadap hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Di masa mudanya, Abdullah Said sebagai tokoh utama Hidayatullah telah aktif dalam Perhimpunan Pelajar Muslim Indonesia (PII). Dia juga menghadiri sekolah asrama modernis di Gontor dan Bangil. Dari sini, pemikirannya mengenai relasi Islam dan Negara semakin kuat. Meski demikian, Abdullah Said selalu berhati-hati agar tidak dianggap sebagai penentang pemerintah Orde Baru.<sup>13</sup> Abdullah Said adalah bagian dari organisasi Muhammadiyah. Sebuah gerakan amal yang menjadikan sekolah, rumah sakit serta pelayanan sosial sebagai pusat kemajuan Islam.

Muhammad Salim Basalamah dalam konteks Minahasa merupakan aktor penting dalam kebangkitan Hidayatullah di sana. Dia seorang warga militer yang sangat bersimpati dengan

---

<sup>12</sup>M. Falikul Isbah, "Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments," *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 8, no. 1 (2020): 66–67.

<sup>13</sup>Robert W Hefner, *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009), 79.

dakwah Islam. Dia berasal dari etnis Arab-Jawa. Selama bertugas di Tomohon, Salim membeli tanah milik warga Kristen Minahasa tanpa peristiwa konflik lalu mendirikan lembaga pendidikan Nurul Islam pada tahun 1970-an. Lembaga ini milik keluarga, tidak langsung di bawah kontrol pemerintah pusat. Pada periode berikutnya, ia mewakafkan tanah tersebut kepada Hidayatullah. Dia mengenal komunitas Hidayatullah ketika berada di Kapal Kambuna. Orang-orang Hidayatullah aktif melakukan penyebaran nilai-nilai Islam di dalamnya. Perjumpaan tersebut mendaatkan kekaguman berbasis solidaritas religius sehingga Muhammad Salim Basalamah mengunjungi Pusat Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Abdul Kadir Abdullah dengan Abdurrahman Muhammad sebagai pengurus inti Hidayatullah Pusat kemudian langsung merespons dengan serius sehingga Yayasan Pesantren Hidayatullah cabang Sulawesi Utara di Minahasa resmi beroperasi pada sekitar tahun 1989.<sup>14</sup>

Beberapa alumni dari Pesantren Hidayatullah banyak yang melanjutkan studi di Timur Tengah dan sebagian besar menjadi guru agama termasuk juru dakwah. Pesantren Hidayatullah berada di bawah kontrol Kementerian Agama RI. Ideologi warga Hidayatullah secara umum merupakan sintesis dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam arti mereka menghormati tradisi Islam Nusantara selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, secara umum cara pandang ini lebih berdekatan dengan Muhammadiyah karena mereka memegang teguh prinsip dasar bahwa hidup manusia harus berdasarkan tauhid, hidup manusia itu bermasyarakat, hanya hukum Allah yang harus dijadikan pedoman untuk membentuk pribadi serta masyarakat menuju hidup bahagia dunia-akhirat. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hanya akan berhasil jika mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Populasi Muslim di Tomohon, Minahasa berjumlah 2.323 jiwa yang tersebar ke berbagai wilayah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ustad Dahlan, Alumni Hidayatullah Minahasa di Tomohon, 28 Juli 2018.

<sup>15</sup>Kementerian Agama Kota Tomohon, "Data Kependudukan Kantor Kementerian Agama Tomohon" (Minahasa, 2016).



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018.

### **Gambar 1.**

**Pesantren Hidayatullah Minahasa**

### **Ideologi Pesantren Hidayatullah di Minahasa**

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mardhatillah adalah jalur penting dari aktivitas pesantren Hidayatullah di Minahasa dan menjadi fokus dalam studi ini. Prasetia Budi Yuwono merupakan pimpinan sekolah dan Samsu Alam bertugas sebagai guru agama Islam. Jika dilihat, kebijakan pengajaran agama Islam wajib dipegang oleh orang dari kalangan Hidayatullah sedangkan untuk mata pelajaran umum lainnya bisa ditugaskan kepada guru-guru lain yang berjumlah tujuh orang. Fakta ini menunjukkan bahwa misi utama pesantren Hidayatullah di Minahasa adalah menggunakan sekolah untuk membangun komunitas yang lebih luas di mana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara komprehensif. Sehingga, guru yang mengatur proses belajar mengajar agama Islam tidak bisa dari sembarangan golongan. Karena akan mempengaruhi ideologi keagamaan Hidayatullah ke dalam bentuk yang berbeda.

Tahun 2012, santri di Madrasah Mardhatillah berjumlah 48 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan model kelas yang terpisah. Sehingga, tidak bercampur dengan alasan menjaga kesucian diri. Mereka mengakui bahwa kurikulum agama Islam yang diajarkan semua merujuk kepada aturan baku yang telah dibuat oleh Kementerian Agama RI. Tapi, penekanan tegas

terhadap dimensi tauhid menjadi ciri khas. Tujuan utamanya adalah melahirkan manusia-manusia yang memahami tugas serta fungsinya sebagai hamba dan pemimpin. Mengenai wacana pluralisme agama dan multikulturalisme, mereka kurang begitu bersimpati karena dianggap paham tersebut bersifat sekuler bukan berorientasi kepada akhirat. Selain itu, kedua wacana tersebut dipandang identik dengan doktrin Islam liberal sehingga tidak akan memiliki titik temu yang memadai.<sup>16</sup>

Pengajaran Akidah adalah perhatian utama mereka untuk mewujudkan kemurnian iman. Mereka percaya bahwa masyarakat muslim harus terlebih dahulu diislamisasi melalui proses bertahap yang mencakup *tarbiyah* dan *tasfiyyah* sebelum penerapan *syariah*. Selain aktivitas di kelas, praktek pengajaran agama juga dilakukan oleh para Ustadz di Masjid At-Taqwa yang menjadi pusat peribadatan santri Hidayatullah di Minahasa. Program ini bernama kajian *Kehidayatullahan* dan tidak termasuk dalam kurikulum resmi Negara. Kajian ini disampaikan setelah sholat berjamaah dan lebih bersifat doktrin kaderisasi;

“Bahwa membangun Peradaban Islam adalah jihad bagi setiap orang yang beriman. Bahwa pusat Peradaban Islam adalah masjid. Oleh karena itu, setiap kader Hidayatullah wajib memakmurkan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, pusat pengembangan ilmu, pusat kebudayaan Islam, pusat pengembangan karakter dan kepemimpinan umat. Bahwa setiap kader Hidayatullah wajib melaksanakan shalat berjamaah di masjid, melazimkan shalat nawafil, terutama qiyamul lail, membaca Al-Qur’an dan melaksanakan amalan ibadah sesuai dengan ketentuan syari’ah. Bahwa setiap kader Hidayatullah adalah generasi Rabbani yang wajib menghidupkan majelis ilmu, membangun tradisi keilmuan dan berdakwah menyebarkan Islam. Oleh karena itu kader Hidayatullah wajib berha-laqah sebagai sarana untuk melakukan transformasi ilmu, transformasi karakter dan transformasi sosial. Bahwa kader Hidayatullah harus menjadi generasi yang berkarakter, peduli, suka menolong, gemar berkorban, tawadhu’,

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ustad Taufik Abu Faris, Guru Agama Islam Hidayatullah di Manado, 03 April 2017.

militan, qana'ah, wara' dan mengutamakan kehidupan akhirat. Bahwa setiap pemimpin dan kader Hidayatullah wajib menjadi teladan di tengah umat. Untuk itu setiap kader harus membangun solidaritas jamaah dan ukhuwah Islamiyah.”<sup>17</sup>

Doktrin kaderisasi di atas perlahan namun pasti berhasil mendorong para santri Hidayatullah untuk menyatakan diri mereka sebagai *Al-Harakah al- Jihadiyah al-Islamiyah*. Doktrin *Jaringan Masyarakat Bertauhid* sangat mempengaruhi nalar, mental dan gerak dari para santri. Guru agama mereka berpendapat bahwa masyarakat merupakan cerminan dari keesaan Tuhan. Masyarakat tauhid tidak mentolerir pengkotakan maupun wewenang politik yang otonom dalam kaitan dengan tatanan keillahian. Kedaulatan mutlak Tuhan, *hakimiyyah* dengan demikian akan tetap berlaku dalam kehidupan individu maupun sosial. Islam bukan saja kumpulan kepercayaan tetapi juga tatanan inklusif yang menyentuh semua aspek kehidupan. Tatanan ini menolak ruang sekular apapun. Jaringan masyarakat bertauhid dimotivasi oleh struktur pahala dan pesona surga.

Mereka juga meyakini bahwa terwujudnya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya tergantung kepada sistem pemerintahan Negara, melainkan tergantung dari komitmen serius individual kaum muslim dalam mengamalkan nilai-nilai agamanya di ruang privat maupun ruang publik dengan konsisten. Dengan demikian, Islam menjadi sistem makna serta identitas yang menjadi basis aksi kolektif.

Penguatan pengajaran agama yang dilakukan di Mts Mardhatillah, Minahasa tidak lepas dari pemikiran dasar bahwa seorang anak muslim yang belajar di sekolah Kristen akan menghadapi setidaknya dua bahaya. Pertama, anak itu mungkin akan masuk Kristen. Kedua, menjadi muslim yang skeptis dan tidak berkomitmen. Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa pemimpin muslim mencoba melakukan setidaknya tiga hal. Pertama, mereka mencoba meyakinkan komunitas muslim

---

<sup>17</sup>Dokumen Komitmen Kader Hidayatullah. Diakses melalui [www.hidayatullah.or.id](http://www.hidayatullah.or.id). 13 Agustus 2018.

melalui media. Kedua, mereka mengajarkan bahwa belajar di sekolah Kristen berbahaya bagi komitmen anak-anak terhadap Islam. Ketiga, umat Islam berusaha mendirikan dan mengembangkan sekolah swasta Islam yang lebih baik untuk bersaing dengan sekolah-sekolah Kristen. Mereka menuntut peraturan negara yang mewajibkan setiap sekolah swasta untuk menyediakan kelas agama sesuai dengan agama siswa.<sup>18</sup>

Dalam konteks Indonesia, konstitusi telah mengadopsi model pengakuan yang menempatkan agama sebagai faktor penting dalam sistem negara. Contohnya adalah pengakuan akan keberadaan Tuhan dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan dan hukum yang dihasilkannya dari konstitusi harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama. Tampaknya, warga Hidayatullah di Minahasa telah memahami konsep ini dan berupaya dengan penuh komitmen untuk meletakkan ideologi Islam sebagai dasar utama dalam sistem pendidikan mereka.

Dengan demikian, jika usaha ini berhasil maka akan memberikan keuntungan moral dan finansial. Guru dan santri di Madrasah Mardhatillah Hidayatullah terikat bersama dalam bentuk komunitas religius yang sangat erat. Para santri tidak akan diizinkan untuk mengucapkan selamat Natal dan melakukan kunjungan ke rumah-rumah orang Kristen lokal saat perayaan Natal tiba. Mereka juga cenderung curiga terhadap literatur-literatur Barat yang masuk ke Pesantren karena dianggap akan menyebarkan paham-paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme yang menyesatkan. Keberlainan iman menimbulkan pembatasan pikiran. Sikap semacam ini tentu sangat dipengaruhi oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Juli 2005 yang mengharuskan pluralisme, liberalisme dan sekularisme karena dianggap bertentangan dengan ajaran akidah dan ibadah Islam.

Paradigma santri Hidayatullah tentu berbanding terbalik dengan paradigma warga Kristen lokal. Menurut Siwu, katalisator utama modernisasi di Minahasa adalah pluralisme agama-juga termasuk multikulturalisme. Taulu mencatat, “Di Minahasa,

---

<sup>18</sup>Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Leiden: Amsterdam University Press, 2006), 243–44.

lembaga yang paling efektif untuk menyebarkan modernisasi adalah pendidikan. Agama Kristen sejak awal kedatangannya di Minahasa menjadi pelopor dalam menjalankan lembaga ini. Proses modernisasi ini sangat dibantu oleh proses rasionalisasi dan sekularisasi melalui Gereja. Saat ini, Minahasa menghadapi tantangan di mana hubungan antara rasionalisasi dan sekularisasi tampaknya bersaing sampai batas tertentu. Minahasa terus melestarikan citra tanah air mereka sebagai tanah Kristen dan pada saat yang sama membuat klaim sebagai tanah modern. Kadang-kadang dikatakan bahwa Minahasa adalah tanah damai dan seribu Gereja.<sup>19</sup>

Menyadari perbedaan paradigma di atas, santri Hidayatullah pada faktanya diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan norma yang homogen. Pesantren Hidayatullah sangat berperan penting dalam proses pelayanan umat di wilayah Tomohon, Minahasa. Gerakan Islam dengan orientasi dakwah dan sosial berkembang dengan cepat dan baik. Kegiatan Islam yang bersifat sosial dan kultural meluas, termasuk dikalangan masyarakat Muslim Minahasa. Aspirasi-aspirasi Islam nonpolitik yang tidak berorientasi partai namun berhadapan dengan Negara secara langsung memperoleh tempat di dalam struktur pemerintahan Presiden Soeharto, khususnya pada satu dekade masa tumbangannya rezim Orde Baru. Dapat dikatakan bahwa kedekatan warga Hidayatullah di Minahasa dengan kelompok militer khususnya TNI-AD melahirkan solidaritas yang kuat secara sosial dan pemerintah Orde Baru juga melihat bahwa warga Hidayatullah secara nasional cukup signifikan jika digunakan sebagai suara politik.

---

<sup>19</sup>Basri Amin, "Moment of Citizenship: Association and Aspiration of Minahasan, North Sulawesi.": 173.



Sumber: Tribun Manado, 2019.

### **Gambar 2.**

Santri Mardhatillah Hidayatullah

Perlu ditegaskan kembali bahwa ideologi dan identitas yang dimainkan oleh santri Hidayatullah di Minahasa melalui pesantren menjadikan mereka harus mengamalkan nilai-nilai fundamental Islam. Aturan ini menjadi benteng pertahanan identitas. Secara teoritis, mereka membuat struktur koalisi yang menghubungkan individu-individu teladan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mewakili massa yang luas. Dengan melakukan itu, mereka membawa Islam untuk bersaing melawan ideologi lainnya yang dianggap menyimpang. Mereka berbagi imajinasi untuk memandang syariat Islam dapat diterapkan sebagai sistem politik, sosial, ekonomi termasuk budaya.<sup>20</sup>

### **Politik Dakwah Hidayatullah di Minahasa**

Pada tahun 2000, Hidayatullah mengubah dirinya menjadi gerakan politik nasional sambil terus mengoperasikan jaringan sekolahnya. Tujuan gerakan ini dideskripsikan dalam istilah agama dan bukan secara politis. Secara khusus, gerakan ini didedikasikan untuk penciptaan peradaban Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Para pemimpin gerakan tetap bersandar

---

<sup>20</sup>Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2008), 21.



pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada saat ini.<sup>21</sup> Secara sosiologis, pergerakan politik dakwah Hidayatullah sangat dominan di wilayah minoritas seperti Minahasa dan mereka harus berhadapan dengan ideologi kelompok Kristen Protestan. Di Minahasa, gereja-gereja memegang peranan penting termasuk institusi non pemerintah yaitu Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM). Mereka memiliki sekitar 650.000 anggota dan mengelola lebih dari 800 sekolah. Meskipun demikian, orang-orang Kristen Minahasa juga mengkhawatirkan hegemoni mayoritas muslim Indonesia baik dalam konteks politik nasional atau terhadap hubungan Kristen-muslim lokal.<sup>22</sup>

Orang-orang Kristen selalu merasa terancam dengan ide dan upaya pembentukan Negara Islam. Sebab, di dalam Negara Islam, kelompok minoritas Kristen akan menjadi warganegara kelas dua dan mendapat perlakuan hukum yang tidak sama. Maka dengan dihapusnya cita-cita Negara Islam dikalangan orang muslim dan penerimaan Pancasila akan semakin melapangkan hubungan dan dialog Islam-Kristen tanpa adanya kecurigaan satu sama lain.<sup>23</sup> Wacana keterancaman seperti ini terjadi juga dalam konteks Minahasa.

Salah satu warga Kristen Minahasa berupaya mengkontekstualisasikan konstruksi identitas dan konflik komunal. Menurutnya, Minahasa adalah salah satu lokasi politik Indonesia dan bahwa seseorang harus mencari cara dan sarana untuk mengurangi konflik komunal berdasarkan alasan etnis atau agama. Bagi orang Minahasa, akar konflik sektarian selalu ada dan sensitif. Dengan demikian, setiap masalah yang terkait dengan politik harus dimulai secara kolektif. Orang Minahasa memahami bahwa tidak mungkin Indonesia menjadi negara Islam. Kelompok radikal harus ditindas oleh hukum negara dan konstitusi. Tentunya berbagai wacana pemerintah selalu membingungkan. Kami

---

<sup>21</sup>Hefner, *Making Modern Muslims : The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, 82.

<sup>22</sup>David Henley, "Memelihara Perdamaian Di Minahasa Pasca Orde Baru," in *Politik Lokal Di Indonesia*, ed. Henk Schulte Nordholt and Gerry Klinken (KITLV-Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 410.

<sup>23</sup>Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*, 596.

akan terus menentang kepentingan sektarian yang dipromosikan oleh individu tertentu dan kelompok mereka. Ini untuk mencegah pemerintah memenuhi kepentingan satu kelompok saja.<sup>24</sup>

Persepsi masyarakat Kristen di Tomohon, Minahasa terhadap pesantren ini pun sangat identik dengan narasi di atas. Pemerintah lokal pun ikut mengawasi pesantren Hidayatullah di sana karena hubungan Islam-Kristen di masa Presiden Joko Widodo kembali memanas. Mulai dari kasus Aksi Bela Islam 212. Respons warga Hidayatullah Minahasa terhadap Aksi Bela Islam 212 tergolong positif. Mereka menuntut keadilan dari Negara bagi Ahok yang telah melakukan penistaan Kitab Suci Qur'an. Meskipun, warga Kristen lokal melihat kasus ini tidaklah murni persoalan teologis melainkan politis.

Aksi Bela Islam tidak hanya menanamkan propaganda agama melainkan melahirkan aktor-aktor yang berperan menyebarkan dakwah Islam di dunia media sosial. Aksi Bela Islam tidak lepas dari aktor lama yang kerap menggulirkan wacana pasca Islamisme di Indonesia yaitu Habib Rizieq Shihab. Di awal dekade pasca reformasi, Habib Rizieq kerap melontarkan respon keras terhadap demokrasi sebagai sistem politik modern. Ia berpendapat bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan musyawarah berbeda dengan makna demokrasi. Demokrasi mengedepankan suara atau suara terbanyak, sedangkan musyawarah mengedepankan hasil kesepakatan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.<sup>25</sup> Aksi Bela Islam merupakan salah satu konsekuensi dari polarisasi masyarakat pasca demokratisasi, dimana perebutan ruang publik semakin besar dan bebas. Aksi Bela Islam merupakan trend baru yang merupakan konsekuensi dari kontes-

---

<sup>24</sup>Basri Amin, "Moment of Citizenship: Association and Aspiration of Minahasan, North Sulawesi.": 177.

<sup>25</sup>Muzzayin Ahyar and Alfitri, "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 22.

tasi dinamis antara identitas Islam dengan nilai-nilai demokrasi modern di ruang publik.<sup>26</sup>

Gerakan politik dakwah Hidayatullah tidak terlepas dari figur Ulama yang mereka taati di Minahasa. Secara teoritis, Ulama adalah elit agama yang memegang otoritas keagamaan. Otoritas agama berarti hak untuk memberlakukan aturan yang dianggap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks Weberian, otoritas keagamaan didefinisikan sebagai hak untuk memaksakan ketaatan atas nama nilai-nilai umum dan aturan perilaku yang dimiliki bersama oleh mereka yang menjalankan otoritas ini dan mereka yang tunduk padanya.<sup>27</sup> Dalam pengamatan yang konsisten di lapangan, gerakan politik dakwah Hidayatullah di Minahasa memiliki korelasi positif dengan dakwah salafi. Wahid (2014) berargumentasi bahwa salafi di Indonesia jauh dari monolitik. Wahid mengkategorikan salafi menjadi tiga yaitu puritan, haraki dan jihadis.<sup>28</sup>

Dalam konteks Minahasa, warga Hidayatullah di sana termasuk pada kategori puritan. Kaum puritan adalah mereka yang menganjurkan kepatuhan mutlak kepada Ulama dan memusatkan aktivitas mereka dalam dakwah dan pendidikan. Dalam kategori ini, karakter puritan cenderung bersifat eksklusif. Mereka menolak semua kolaborasi dengan kelompok dan organisasi yang mereka anggap sebagai hizbi (partisan, menyebabkan perpecahan) yang mencakup hampir semua orang. Di bidang pendidikan, mereka menolak kurikulum nasional yang bermuatan pluralisme agama dan multikulturalisme. Gerakan politik dakwah Hidayatullah di Minahasa dapat dipetakan ke dalam tiga pola.

*Pertama*, sejak 1978 Hidayatullah melakukan pengiriman da'i ke seluruh Indonesia. Setidaknya setiap tahun, Hidayatullah

---

<sup>26</sup>Ahyar and Alfitri, "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia," 25.

<sup>27</sup>Din Wahid, "Challenging Religious Authority: The Emergence of Salafi Ustadhs in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 2 (2012): 246.

<sup>28</sup>Din Wahid, "Nurturing Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantren in Contemporary Indonesia." *Wacana*, 15, No. 2 (2014): 372-373.

mengirimkan 150 da'i. Politik dakwah Hidayatullah menghendaki adanya kesetiaan, keberpihakan dan kewajiban membela agama secara kolektif. Masjid dan Negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nasionalisme adalah iman, tanah air adalah *Dar al-Islam*, penguasa utamanya Allah dan rujukannya Al-Qur'an. Gerakan missionaris Islam yang dilakukan para mubaligh Hidayatullah di Tomohon, telah meluas sampai ke Palaes, Minahasa Utara. Mereka mencari orang-orang Kristen lokal yang hidup miskin dan terasing dari jemaatnya untuk diberikan doktrin Islam puritan.

*Kedua*, tradisi pernikahan mubarakah juga dianggap sebagai gerakan dakwah yang harus dilalui oleh santri Hidayatullah. Tujuannya untuk menguatkan, melindungi sekaligus memfasilitasi ideologi dengan pasangan satu fikrah demi membangun kekuatan Islam di ruang minoritas. Beberapa alumni mengakui bahwa mencari pasangan yang memiliki satu pemahaman dan cita-cita sangat sulit di tengah masyarakat sekuler. Bagi mereka, tradisi ini sangat nikmat karena lahir ketaatan total antara suami-istri yang berpotensi menjadi da'i militan. Pengaruh tradisi pernikahan mubarakah dapat dikatakan cukup kuat bagi suksepsi politik dakwah Hidayatullah di Minahasa. Dalam tradisi pernikahan mubarakah, para sesama alumni Hidayatullah menerapkan pola perilaku, bahasa, pakaian, bahan bacaan dan hubungan-hubungan sosial yang berbeda. Mereka wajib berkorban dengan segala bentuk kesenangan duniawi yang mengarah kepada kamaksiatan.

Penafsiran yang bersandar pada rasionalitas sekuler kurang diminati. Pada titik ini, karakter hidup Salafi mulai diadopsi secara bertahap. Dalam kerangka analitik identitas sosial, perasaan-perasaan individual yang berkembang di dalam mekanisme *ingroup love-outgroup hate* ini jalin menjalin dengan persepsi dan pemahaman mereka dengan lingkungan sosial yang kompleks dan berada di luar diri mereka. Mereka kemudian menciptakan dua kategori sosial. Pertama, mengidealkan diri dan kelompok mereka. Kedua, mereka membangun *intergroup comparison* dengan membandingkan betapa mulianya diri mereka dengan kelompok lain yang menyimpang. Citra ini terus dipertahankan dari masa Orde Baru hingga Reformasi. Taufik Abu Faris

adalah guru agama yang menikahi Wiwin Modeong yang merupakan santriatinya sendiri dengan alasan tradisi mubarakah ini sejak 2005.

*Ketiga*, distribusi Majalah Hidayatullah merupakan strategi dakwah ketiga yang digunakan Jamaah Hidayatullah untuk melakukan proyek Islamisasi. Majalah ini memiliki izin terbit SIUPP No.1105/SK/Menpen/SIUPP/1999. Pendirinya adalah Abdullah Said, perintis Abdul Latief Usman dan Manshur Salbu dan direktur utamanya adalah Hamim Thohari. Awal masuknya Majalah Hidayatullah di Minahasa terjadi pada tahun 1989 bersamaan dengan kedatangan Abdul Kadir Abdullah dan Abdurahman Muhammad. Majalah ini disusun di Tembak, Balikpapan, lalu dicetak di Surabaya kemudian dikirim melalui jalur laut dari pelabuhan Tanjung Perak menuju pelabuhan Bitung. Ketika pertama kali menyebar di Manado dan wilayah Minahasa, Majalah ini masih sangat kental dengan nuansa pemurnian tauhid (puritanisme).

Proses distribusinya pun sangat eksklusif dan tidak beredar di toko-toko buku besar seperti Gramedia di Manado sebagai Ibukota Provinsi. Masyarakat muslim lokal hanya dapat memesan secara personal kepada Ustadz yang berafiliasi dengan Hidayatullah.<sup>29</sup> Majalah ini menjadi sumber bacaan dan rujukan utama bagi kelompok santri Hidayatullah di Minahasa bahkan sampai menyebar ke cabang-cabang Hidayatullah di Bolaang Mongondow (wilayah Mongkonai- Kotamobagu dan Ibolian-Dumoga) yang merupakan mayoritas Muslim terbesar di Sulawesi Utara. Ustadz Rusdin Bonde dan Ustadz Amir adalah mubaligh Hidayatullah yang memegang kendali dakwah di sana.

Samsul Arifin mengakui bahwa tantangan gerakan dakwah mereka di Minahasa adalah respons sebagian masyarakat Kristen yang masih melakukan penilaian berdasarkan pemikiran intuitif untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dalam mengambil keputusan secara cepat bukan tepat. Keputusan ini didasarkan pada keanggotaannya saja sehingga muncul perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan standar,

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ustad Samsul Arifin, Koordinator Dakwah Hidayatullah di Manado, 13 Agustus 2018.

kategori, atau simbol tertentu. Selain berbentuk media cetak, majalah Hidayatullah juga telah mengkonversikan dirinya menjadi media online. Secara teoritis, kehadiran media baru berbasis online yang ada saat ini telah mengubah lanskap keberadaan otoritas keagamaan sehingga menimbulkan penafsiran baru dalam masyarakat. Di dunia Muslim, ia menempatkan otoritas politik dan agama yang terfragmentasi dan bersaing antara yang lama dan yang baru. Berdasarkan peringkat yang dirilis secara resmi oleh Alexa and Similarweb, website hidayatullah.com menempati posisi ke 4 dan mendominasi opini umat di ranah online publik.<sup>30</sup> Peringkat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
Perbandingan Peringkat Website Organisasi Islam  
Berdasarkan Alexa dan Similarweb.

Website	9 October 2017	29 October 2017	Website	National	Global
portal-islam.id	473	463	Eramuslim.com	489	22,825
eramuslim.com	615	581	Portal-islam.id	532	26,416
nu.or.id	784	705	Nu.or.id	959	42,312
hidayatullah.com	1,159	1,025	voa-islam.com	1,155	49,820
voa-islam.com	1,332	1,328	hidayatullah.com	1,322	51,188
dakwatuna.com	1,555	1,475	dakwatuna.com	2,403	100,063
muslimmoderat.net	3,543	3,470	arrahmah.com	3,480	137,489
arrahmah.com	3,061	4,646	muslimmoderat.net	3,910	143,135
suara-islam.com	5,375	6,281	suara-islam.com	8,413	269,714
suaramuhammadiyah.id	8,629	8,198	suaramuhammadiyah.id	15,222	577,632
mta.or.id	22,335	21,566	mta.or.id	32,548	1,027,581
dewandakwah.or.id	195,912	100, 146	nw.or.id	167,351	496,207
Majelismujahidin.com	116,662	118,415	Thoriquna.id	444,084	6,613,736
nw.or.id	135,276	177,611	Majelismujahidin.com	525,425	1,618,158
			dewandakwah.or.id	588,149	10,09,582

Sumber: Wahyudi Akmaliah, 2019.

Sebagai konsekuensi dari gerakan politik dakwah yang mereka lakukan, tahun 2008 Samsul Arifin pernah diundang Radio Kabar Baik 100.0 FM di Kakaskasen Dua, Tomohon milik Syanet, seorang Pena Tua untuk mengadakan dialog teologis terkait kasus pembakaran Gereja oleh FPI di Bandung. Ketika

<sup>30</sup>Wahyudi Akmaliah, “The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2019): 11.

sesi tanya jawab, pembicaraan mulai dibatasi karena adanya ketakutan terhadap serangan komunitas Kristen lokal dari anggota GMIM. Meski demikian, Nuryadin sebagai Pimpinan Pesantren Hidayatullah Minahasa saat ini mulai membangun komunikasi dengan pihak GMIM terkait hak dan kewajiban masyarakat lintas agama pada ruang publik.

GMIM dipimpin oleh Pendeta Dr. Hanny W.B. Sumakul. Mereka memiliki misi yang sangat kuat yakni mencapai tingkat spiritualitas beriman warga gereja yang mampu mewujudkan pola hidup Yesus Kristus dalam semua bidang kehidupan. Mencapai kualitas komunikasi dan kerjasama gereja-gereja yang saling mengakui dan menerima untuk mewujudkan gereja yang esa di seluruh dunia. Dan memperluas jangkauan pemberitaan Injil kepada segala makhluk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan hidup. Dalam perspektif politik identitas, jika misi ini mendapat tantangan dari agama lain maka konflik komunal akan bangkit dan menyebabkan kacaunya stabilitas Nasional.

Pergerakan Taufik Abu Faris dalam politik dakwah ini juga sangat penting. Dia serius memobilisasi para mubaligh, mempromosikan pernikahan mubarakah sekaligus menyebarluaskan majalah Hidayatullah. Jika memperhatikan kembali posisi Hidayatullah di benteng Kristen Protestan Minahasa, maka dapat dipahami bahwa orientasi utama politik dakwah yang mereka lakukan adalah tetap mempertahankan eksistensi agama dalam negara secara menyatu (*integrated*) bukan terpisah (*intersection*). Mereka menafsirkan proses integrasi agama dengan negara ke dalam dua bentuk. Pertama, integrasi sistem, dimana ajaran-ajaran hukum Islam harus didorong untuk menjadi sistem negara. Kedua, integrasi figur, dimana pimpinan agama khususnya Islam adalah juga pimpinan negara. Sehingga hak menjalankan syariat Islam, identitas sosial dan partisipasi dakwah bisa terpelihara dalam jangka panjang.



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018.

### **Gambar 3.**

Perkampungan Kinilow: Lokus Perjumpaan Warga Kristen dan Santri Hidayatullah di Minahasa

Politik dakwah Hidayatullah di Minahasa memberikan pemahaman baru bahwa Islam adalah agama yang lahir dari perpaduan iman dan politik. Perpaduan ini membentuk kesadaran akan keberlainan dalam konteks masyarakat Kristen di Minahasa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya simpatisan yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam gerakan bela agama. Mereka meyakini bahwa orang Islam harus menjadi pemimpin bagi agama lain. Doktrin akidah dan keselamatan dalam Al-Qur'an telah menyadarkan mereka bahwa ajaran Islam tidak hanya berlaku pada wilayah privat tetapi juga wilayah publik.<sup>31</sup> Pada bagian akhir ini, dapat dianalisis bahwa politik dakwah Hidayatullah tentu saja sangat berkaitan erat dengan dasar Piagam Jakarta. Dalam teks Piagam Jakarta, Pancasila menekankan *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam kepada pemeluk-pemeluknya*. Piagam Jakarta diyakini sebagai simbol pengorbanan umat Islam Indonesia untuk bangsa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Almunawar Bin Rusli, "Polemik Muallaf Di Minahasa: Studi Tentang Iman dan Pilihan Politik," *Jurnal Dialog* 43, no. 1 (2020): 29.

<sup>32</sup>Abdul Mu'ti and Ahmad Najib Burhani, "The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 117.



## **PENUTUP**

Sejarah jaringan Hidayatullah di Minahasa merupakan fenomena gerakan sosial-keagamaan yang berlangsung sejak masa Orde Baru atas peran Muhammad Salim Basalamah. Pesantren dan politik dakwah adalah dua misi utama mereka untuk mempertahankan ideologi sekaligus identitas sebagai seorang muslim minoritas. Pesantren memberikan ajaran tauhid, syariah dan muamalah secara doktriner. Sedangkan politik dakwah menjadi strategi mereka dalam menyebarkan kebenaran Islam kepada masyarakat Kristen melalui diaspora mubaligh, pernikahan mubarakah dan distribusi majalah Hidayatullah.

Hubungan pesantren dan politik dakwah Hidayatullah di Minahasa terletak pada tiga hal yaitu aktor, aktivisme dan ideologi. Aktor yang terlibat adalah guru agama. Identitas keagamaan puritan menjadi sumber makna yang mereka bangun dalam proses interaksi sosial. Aktivisme adalah mobilisasi penentangan dan aksi kolektif yang melibatkan sekelompok santri dalam upaya mereka memperjuangkan tujuan bersama. Sedangkan ideologi berfungsi sebagai penggerak dan landasan pemikiran di belakang aktivitas keagamaan Hidayatullah. Kehadiran Hidayatullah di Minahasa ikut mendorong tumbuhnya semangat santrinisasi. Mereka ingin memfasilitasi jamaahnya dalam rangka menunaikan ajaran Islam secara kaffah seraya meneguhkan keyakinan bahwa Islam tetap menduduki tempat terhormat di Indonesia. Santrinisasi melahirkan militansi iman dalam solidaritas bayangan. Solidaritas bayangan adalah kesetiaan dan kepatuhan kepada pemimpin dalam membela Islam dari serangan kaum kafir.

## **Ucapan Terima Kasih**

Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Delmus Puneri Salim, Ph. D, Sulaiman Mapiasse, Ph. D, Nono S.A. Sumampow dan Alex J. Ulaen yang telah memberikan dorongan, bimbingan sekaligus arahan sehingga penelitian lapangan ini dapat dilakukan untuk memperluas kajian Islam di Indonesia yang terus hadir, berkembang juga berubah. Kedua, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arhanuddin Salim

sebagai Kepala LP2M IAIN Manado yang telah memberikan dukungan dalam bentuk moril dan materil sehingga penelitian ini tidak terasa berat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aritonang, Sihar Jan. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Bruinessen, Martin Van. "Tradisionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia," in *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*, ed. Farish A. Noor et.al. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
- Hasan, Noorhaidi. "Islam Di Kota-Kota Menengah Indonesia." In *Search of Middle Indonesia*, edited by Gerry Klinken and Ward Berenschot. KITLV-Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi Dan Teori*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militansi Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Hefner, Robert W. *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009.
- Henley, David etal. "Memelihara Perdamaian Di Minahasa Pasca Orde Baru." In *Politik Lokal Di Indonesia*, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry Klinken. KITLV-Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- De Jonge, and Christiaan. "How Christianity Obtained A Central Position in Minahasa Culture and Society." in Jan Sihar Aritonang And. "A History of Christianity in Indonesia", edited by Karel Steenbrink. Leiden-Boston: Brill, 2010.
- Kementerian Agama Kota Tomohon. "*Data Kependudukan*

*Kantor Kementerian Agama Tomohon.*” Minahasa, 2016.

Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press, 2006.

## **Jurnal**

Ahyar, Muzzayin and Alfitri. "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no.1(2019): 22.

Akmaliah, Wahyudi. "The Demise of Moderate Islam : New Media, Contestation and Reclaiming Religious Authorities." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 no.1 (2019): 11.

Amin, Basri. "Moment of Citizenship : Association and Aspiration of Minahasan, North Sulawesi," *International Journal of Indonesian Society and Culture* 9, no.2 (2017):173.

Hamdi, Saipul, Paul J. Carnegie and Bianca J. Smith, "The Recovery of a Non-Violent Identity for an Islamist Pesantren in an Age of Terror." *Australian Journal of International Affairs* 69, no.6 (2015): 692-710.

Isbah, M. Falikul. "Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments." *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIIS)* 8, no. 1 (2020): 66–67.

Mu'ti, Abdul and Ahmad Najib Burhani. "The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no.1 (2019):117.

Rusli, Almunawar Bin. "Polemik Muallaf di Minahasa : Studi tentang Iman dan Pilihan Politik." *Jurnal Dialog* 43, no.1 (2020): 29.

Rusli, Almunawar Bin. "Syekh Mohammad Arsyad Thawil (1851-1934): Perjumpaan Ulama Banten dengan Jemaat Kristen Minahasa." *Jurnal Al-Qalam* 26, no.1 (2020): 131.

Wahid, Din. "Challenging Religious Authority : The Emergence of Salafi Ustadhs in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 6, no.2 (2012): 246.

Wahid, Din. "Nurturing Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantren in Contemporary Indonesia", *Wacana* 15, No. 2 (2014): 372-373

Weichart, Gabriele. "Identitas Minahasa." *Jurnal Antropologi Indonesia* 74 (2004): 61.

### **Website**

Dokumen Komitmen Kader Hidayatullah. [www.hidayatullah.or.id](http://www.hidayatullah.or.id). Diakses 13 Agustus 2018.